

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam sistem internasional terdapat suatu pola ketergantungan antar negara-negara di dunia. Akan tetapi yang banyak terjadi bukanlah pola hubungan yang sejajar, dalam arti banyak perbedaan diantara aktor-aktor tersebut dan kapasitas mereka untuk mempengaruhi keseluruhan sistem yang beragam.

Pada hakikatnya suatu hubungan antar negara selalu diwarnai oleh dua macam situasi yaitu, damai dan konflik. Kenyataan ini tidak dapat dihindarkan mengingat setiap negara tidak memiliki keinginan dan kepentingan yang sama satu dengan lainnya. Hal ini dapat memunculkan konflik yang merupakan suatu hal yang selalu ada dalam Hubungan Internasional

Dewasa ini merupakan masa yang penuh dengan dinamika konflik di berbagai kawasan dunia. Berbagai aspek (ekonomi, kekuasaan, etnis, agama) mewarnai berbagai pertikaian yang melibatkan individu, kelompok, dan negara. Para pengamat internasional bahkan menyebut dunia yang kita diami saat ini sebagai “*turbulent world*” dimana gangguan keamanan, dan kekerasan mewarnai kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Namun hal tersebut bukan berarti bahwa konflik atau pertentangan yang terjadi tidak bisa diselesaikan. Jalan keluar lagi penyelesaian konflik tersebut pasti akan didapat meskipun harus melalui proses dan jangka waktu lama.

Salah satu konflik yang mewarnai tatanan internasional dan belum ada penyelesaiannya yakni konflik yang terjadi di Siprus. Siprus merupakan negara di kepulauan Mediterania, yang terdiri dari dua komunitas etnis, yang terlibat konflik cukup lama bahkan konflik tersebut telah mengakar cukup lama dalam kehidupan bermasyarakatnya.

Siprus merupakan sebuah negara kecil di kepulauan Mediterania dan terletak pada titik pertemuan dari tiga benua yakni benua Eropa, Asia, dan Afrika dan berada 40 mil dari Turki dan 350 mil sebelah timur Yunani. Hal ini selain menambah keuntungan strategis, bagi kepentingan dan pembangunan di Siprus namun juga membawa kerugian bagi Siprus. Populasi penduduk terdiri dari 79%

Siprus Yunani, 18% Siprus Turki, 4% keturunan Armenia, Maronite, dan Latin Cypriots.¹

Kehadiran kedua komunitas yang berbeda etnis serta agama tersebut, dimana Siprus Yunani yang memeluk agama Kristen merupakan keturunan Yunani dan Siprus Turki yang merupakan keturunan Turki dan beragama Islam adalah merupakan pemicu munculnya konflik di Siprus.

Lokasi Siprus yang strategis membuat Siprus menjadi ajang perebutan banyak kepentingan selama bertahun-tahun. Selain itu juga Siprus menjadi sasaran dari invasi dan arena yang potensial bagi munculnya konflik. Siprus pernah berada dibawah kekuasaan bangsa Yunani, Asiria, Persia, Romawi, dan Turki serta Inggris yang hingga saat ini masih terlibat pada kebudayaan di Siprus.

Setelah diperintah selama lebih dari tiga abad oleh kekaisaran Ottoman dari Turki, Siprus kemudian menjadi bagian dari Inggris sampai memperoleh kemerdekaannya pada tahun 1960. Sejak berada dibawah koloni Inggris sudah muncul keinginan dari komunitas Siprus Yunani untuk menentukan nasib sendiri yang diikuti oleh keinginan untuk menghubungkan diri dengan Yunani. Namun disaat yang sama nasionalisme diantara komunitas Siprus Turki meningkat dan menimbulkan pertentangan antara nasionalis yang diikuti dengan penolakan Siprus Turki terhadap upaya penentuan nasib sendiri (*self determination*) atau bentuk lain dari kepemimpinan pemerintah yang dipimpin oleh golongan mayoritas.²

Pada tahun 1960, the London and Zurich agreement di tandatangi dimana Inggris, Turki, dan Yunani menjadi kekuatan penjamin dalam persetujuan tersebut. Persetujuan tersebut menghasilkan negara republik Siprus yang bikomunal. Negara dibagi berdasarkan Siprus Turki dan Siprus Yunani yang memiliki status sebagai pendiri dan kedudukan yang sama. Namun secara mendasar akibat dari konstitusi baru tersebut menjadi hampir tidak mungkin untuk berfungsinya negara secara efektif karena konstitusi ditujukan kepada penciptaan pembagian-pembagian dibandingkan dengan mempromosikan persatuan dan kerjasama.

¹ www.kypros.org. 12 September 08, jam 23.30 WIB

² www.iycos.com 12 September 08. jam 23.15 WIB

Tiga tahun setelah memperoleh kemerdekaannya, hubungan antara masyarakat Siprus Turki dan Siprus Yunani bertambah buruk dimana Siprus Yunani mulai melakukan tindakan kejam terhadap komunitas minoritas Siprus Turki dengan memaksa mereka pindah ke daerah kantong dan menolak hak-hak mereka.

Akhirnya komunitas Siprus Turki meninggalkan tanah dan rumah mereka dan pindah ke daerah kantong bagi komunitas siprus turki yang luasnya hanya 3% dari keseluruhan pulau tersebut. Padahal menurut konstitusi yang ditetapkan pada tahun 1960 komunitas siprus turki mendapatkan 30% dari keseluruhan pulau tersebut.

Kekerasan antara kedua komunitas tersebut meletus antara 1964-1967 yang mengakibatkan 350 warga siprus turki dan 250 Siprus Yunani meninggal. Tahun 1964, PBB mengirim pasukan penjaga perdamaian untuk mengelola dan menyelesaikan konflik yang terjadi di Siprus. Kehadiran badan dunia itu membentangkan pagar berduri sebagai batas serta menempatkan pasukan perdamaian yang diharapkan mampu memberi angin segar bagi upaya penyelesaian konflik yang mengakar cukup lama dalam suatu masyarakat, seperti yang terjadi di Siprus perubahan-perubahan politik dunia pasca perang dingin telah mendorong masyarakat Eropa untuk mengembangkan dan menerapkan kebijakan yang jauh berbeda dengan sebelumnya.

Solidaritas dan kesiapan masyarakat Eropa untuk mendukung keberhasilan gerakan pembaharuan di Eropa Tengah dan Timur dinyatakan oleh Presiden Prancis Francois Mitterrand di Paris pada tanggal 20 November 1991. Mitterrand menyatakan

*we declare our selfs ready to corporate on everything which makes possible the recovery of Eastern European countries which are going through a crisis... we are ready to contribute all our means to this restoration, to the reestablishmet of healthy economi at the price, a sinequa non condition after cormfirmed return of democracy.*³

³ Agus R. Rahman. *Penelitian Perubahan Konfigurasi Ekonomi Politik Eropa: Pedalaman Perluasan masyarakat Eropa*. Pusat penelitian dan Pengembangan Politik dan kewilayahan LIPI. Jakarta. Hlm 70

Artinya: Uni Eropa siap untuk bekerjasama dalam hal perbaikan Eropa Timur dalam melewati kerisis yang mereka hadapi... Uni Eropa juga siap untuk membantu perbaikan dalam rangka perbaikan ekonomi, setelah mereka menjadi negara yang demokrasi

Perubahan sistem internasional mendorong negara-negara di Eropa terutama yang tergabung dalam masyarakat Eropa untuk mulai meningkatkan kerjasama yang lebih intensif dibidang ekonomi, politik, masalah hukum dan urusan dalam negeri. Hal itu terbukti dengan pembentukan Uni Eropa melalui perjanjian Maastricht yang ditandatangani pada tanggal 29 Oktober 1993 dan dinyatakan mulai berlaku pada tanggal 1 November 1993.⁴

Uni Eropa membuka kesempatan bagi negara-negara baru dikawasan Eropa Tengah dan Timur melalui penerapan kebijakan perluasan keanggotaan. Perluasan keanggotaan merupakan suatu tantangan tersendiri bagi Uni Eropa karena perluasan tersebut meliputi jangkauan yang cukup luas serta adanya perbedaan seperti latar belakang sejarah, pembangunan, pertumbuhan ekonomi, demokrasi serta populasi dari negara-negara kandidat anggota.

Perluasan tersebut akan meliputi penambahan wilayah mencapai 34% serta penambahan populasi hingga mencapai 105 juta.

Perdebatan panjang mengenai diterima tidaknya Turki sebagai anggota Uni Eropa disebabkan sikap negara tersebut yang tetap tidak menerapkan perjanjian tahun 2005. Perjanjian tersebut mewajibkan Turki membuka semua pelabuhan dan bandar udaranya kepada 10 anggota baru Uni Eropa, di antaranya Siprus.

Masalahnya Turki saat ini tidak mau mengakui pemerintahan Siprus yang didominasi keturunan Yunani. Sementara itu, di Siprus sendiri masih berlangsung konflik politik yang berkepanjangan sejak 1974 antara warga keturunan Yunani, yang menguasai selatan Siprus dan warga keturunan Turki yang mendiami wilayah utara pulau tersebut.

Sikap Turki atas Siprus tersebut membuat sebagian anggota Uni Eropa menginginkan agar Turki patut diberi pelajaran. Namun, sebagian anggota Uni Eropa meminta agar perhimpunan tersebut jangan mengasingkan Turki mengingat

⁴ Broto R. Utomo. *Studi Kawasan Uni Eropa*. Pusat Penelitian dan Latihan DEPLU. Jakarta. Hlm.2

negara di ujung timur Eropa yang berbatasan dengan Irak, Iran, dan Suriah tersebut memiliki peran yang strategis.⁵

Selain itu, para menlu Uni Eropa menekankan pentingnya setiap tahun memantau perkembangan proses penerimaan keanggotaan Turki, yang mulai dirundingkan sejak Oktober 2005. Bila diterima, Turki akan menjadi negara muslim pertama di Eropa yang menjadi anggota Uni Eropa. Proses keanggotaan tersebut diperkirakan memakan waktu hingga sepuluh tahun.

Namun, selama ini belum ada tenggat baru untuk mengkaji perkembangan proses tersebut. Sebagian menlu Uni Eropa akhirnya meminta pengertian dan kesabaran Turki atas permohonannya menjadi anggota baru. “Turki harus mengerti bahwa tidak ada jalan pintas,” kata Menteri Luar Negeri Siprus, George Lillikas.⁶ Sebagai konsekuensi atas ditundanya keanggotaan Turki, para menlu Uni Eropa meminta agar mereka mencabut embargo ekonomi kepada masyarakat Siprus di bagian utara.

Pemerintah Turki sebelumnya menegaskan bahwa penyelesaian pergolakan di Siprus jangan ditimpakan kepada mereka, namun harus diselesaikan oleh Uni Eropa. Caranya, Uni Eropa harus terlebih dahulu mengakhiri blokade ekonomi kepada penduduk Siprus keturunan Turki.

“Kami tidak mau disuruh memilih, mengutamakan masalah Siprus atas keanggotaan di Uni Eropa,” kata Menteri Kehakiman sekaligus juru bicara Pemerintah Turki, Cemil Cicek di Ankara. Dengan kata lain, Turki berupaya mengamankan kepentingannya di Uni Eropa sekaligus melindungi saudara-saudara mereka di Siprus.⁷

1.2 Permasalahan

1.2.1 Identifikasi Masalah

Pada dasarnya keanggotaan Masyarakat Eropa terbuka bagi sesama negara Eropa lainnya. Berdasarkan Pasal 8 akta tunggal Eropa yang diamandemen dari

⁵ Keanggotaan Turki di Uni Eropa Ditunda, Sinar Harapan, 12-12-06. diakses melalui www.google.com

⁶ Ibid

⁷ Opcit

paragraf pertama pasal 237 perjanjian Roma, perjanjian menandai terbentuknya MEE di tahun 1957, dinyatakan:

*Any European state may, apply to become member of the community. It shall address its application to the council, which shall act unanimously after consulting the commission and after receiving the assent of the European parliament which shall act by, an absolute majority, of its component members.*⁸

Artinya: Setiap negara Eropa berhak untuk mencalonkan diri sebagai bagian komunitas Eropa, dan aplikasi tersebut diterima oleh council, dan setelah mendapatkan persetujuan dari mayoritas anggota lainnya barulah mereka diterima menjadi anggota.

Pada tahun 1993, perjanjian Maashtich, yang menandai perubahan nama masyarakat Eropa menjadi Uni Eropa telah diratifikasi. Perubahan tersebut bertujuan untuk mempertegas identitas Eropa atas para negaranya serta sebagai upaya memperkuat integrasi Eropa melalui tiga pilar. Ketiga pilar tersebut adalah: kerangka kerja masyarakat Eropa, kerjasama kebijakan luar negeri, dan kerjasama dalam bidang hukum serta masalah-masalah dalam negeri.⁹

Pesatnya perkembangan yang dicapai oleh Uni Eropa serta didukung oleh stabilitas ekonomi dan politik membuat negara-negara Eropa lainnya termasuk Siprus tertarik untuk bergabung menjadi anggota. Penerimaan anggota baru Uni Eropa telah diatur dalam pasal 49 *European Union Treaty*, yang menyatakan bahwa Dewan Uni Eropa harus secara bulat setuju untuk membuka negosiasi, setelah berkonsultasi dengan Komisi Eropa dan menerima persetujuan resmi dari Parlemen Eropa.

Uni Eropa memiliki standar, meliputi kriteria politik dan ekonomi yang harus dipenuhi oleh negara-negara yang ingin menjadi anggota. Pada tanggal 22 Juni 1993, Dewan Eropa bertemu di Kopenhagen merumuskan kriteria keanggotaan baru Uni Eropa. Syarat-syarat keanggotaan Uni Eropa adalah:

1. Adanya Institusi yang stabil yang dapat menjamin berjalannya demokrasi, penegakan hukum, hak asasi manusia, dan perlindungan terhadap minoritas;
2. Adanya ekonomi pasar dengan kapasitas yang memungkinkan dalam menghadapi tekanan kompetitif dan tekanan pasar Uni Eropa;

⁸ Agus R. Rahman. Ibid. Hlm 54

⁹ Jan Erik Lane dan Staveoersson. *European Politicis : An Introduction*: Sage Publication Ltd. London. Hlm 69

3. Kemampuan memenuhi kewajiban keanggotaan termasuk taat pada cita-cita politik, ekonomi, dan moneter Uni Eropa.

Perluasan keanggotaan juga akan mengalami masalah mengenai besarnya biaya, baik biaya primer maupun biaya sekunder, yang harus ditanggung oleh Uni Eropa. Biaya primer yaitu biaya rutin untuk menjalankan roda administrasi Uni Eropa bantuan keuangan, bantuan proyek dan bantuan teknis, dan subsidi-subsidi dalam penerapan kebijakan bersama. Pelaksanaan *Common Agriculture Policy* (CAP) serta *Common Transportation policy*, terutama di tunjukkan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi di negara-negara anggota yang miskin dan berupaya mencapai pemerataan ekonomi di seluruh wilayah Uni Eropa.

Tanggal 1 Mei 2004 merupakan saat bersejarah bagi perluasan keanggotaan Uni Eropa. Uni Eropa saat ini terdiri dari 15 negara akan bertambah menjadi 25 negara. Dari 13 calon negara baru (Bulgaria, Siprus, Czech Republik, Estonia, Hungary, Latvia, Lithuania, Malta, Poland, Rumania, dan Turki), 10 diantaranya (kecuali Bulgaria, Rumania, Turki) akan menjadi anggota Uni Eropa. Bulgaria dan Rumania direncanakan bergabung tahun 2007, sedangkan Turki belum ditentukan saatnya.

Prinsip perluasan Uni Eropa adalah semua calon negara harus memenuhi ketentuan yang dimiliki Uni Eropa saat ini, antara lain menyangkut isu politik (kecuali bagi Siprus dan Malta), hukum, serta kerjasama lainnya seperti dibidang industri, lingkungan, perhubungan, bea cukai dan liberalisasi perdagangan termasuk isu yang berkaitan dengan perdagangan. Perluasan Uni Eropa bertujuan untuk secara progresif membentuk perdagangan bebas antara Uni Eropa dengan calon negara anggota, dengan dasar repositas namun dalam kaidah asimetris. Dengan kata lain, liberalisasi akan lebih cepat diimplementasikan oleh Uni Eropa di satu sisi dibandingkan calon negara anggota sisi lainnya.

Persyaratan untuk menjadikan untuk menjadi anggota Uni Eropa mencakup kurang lebih 30 pokok perundingan untuk disepakati yaitu meliputi: *free movement of goods, freedom of movement persons, freedom to provide services, free movement of capital, company law, competition policy, agriculture*

, fisheries, transport policy, taxation, economic and monetary union, staistic and social policy, energy, industrial policy,....

Perluasan Uni Eropa dengan berbagai komitmen yang disepakati calon negara anggota akan menciptakan peluang yang semakin besar, namun sebaliknya juga dapat mengancam eksistensi produk dari produk ekspor mitra dagangnya. Untuk itu setiap negara yang ingin melakukan transaksi dagang dengan anggota negara Uni Eropa perlu melakukan langkah strategis (proaktif). Untuk meningkatkan kesiapannya, sehingga perluasan Uni Eropa dapat memberikan manfaat dalam peningkatan kinerja ekonomi khususnya dibidang ekonomi khususnya di bidang industri dan perdagangan.

1.2.2 Pembatasan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang penelitian dan identifikasi masalah di atas, maka penelitian ini hanya pada aspek mengenai implikasi masuknya Siprus dalam keanggotaan Uni Eropa terhadap proses penerimaan Turki dalam keanggotaan Uni Eropa. Kurun waktu penelitian ini dibatasi sejak tahun 2004-2008, karena pada tahun 2004 Siprus diterima menjadi anggota penuh (*full membership*) dalam Uni Eropa.

1.2.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut: Bagaimanakah Implikasi Penerimaan Siprus Dalam Keanggotaan Uni Eropa Terhadap Proses Penerimaan Turki Dalam Keanggotaan Uni Eropa?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah pengaruh Siprus terhadap proses penerimaan Turki dalam keanggotaan Uni Eropa.

1.3.1 Manfaat Penelitian

Sebagai referensi bagi para peneliti yang menaruh minat terhadap kajian Uni Eropa, dan memberikan warna terhadap fenomena yang saat ini terjadi di kawasan Eropa.

1.4 Kerangka Pemikiran

1.4.1 Pendekatan

Untuk mengetahui apakah implikasi penerimaan Siprus dalam keanggotaan Uni Eropa terhadap proses penerimaan Turki dalam keanggotaan Uni Eropa, peneliti akan menggunakan prespektif neo-liberal institusionalis oleh Robert O. Keohane.

Perspektif ini memiliki empat asumsi dasar yaitu:

1. Neo-liberal institusionalis, mengakui keberadaan aktor negara dan non negara. Negara merupakan perwakilan resmi yang memiliki legitimasi dari masyarakat;
2. Bagi neo-liberal institusionalis, struktur sistem internasional berada dalam kondisi yang anarki. Kondisi sistem internasional yang anarki dapat diatasi melalui pembentukan institusi internasional yang berperan sebagai mediator. Selain itu, institusi internasional juga berperan sebagai tempat penyelesaian hukum internasional dan masalah lainnya.
3. Interaksi pada tingkat regional dan global semakin meningkat sehingga akan berkembang menjadi tahapan intergerasi
4. Neo-liberal institusionalis berpendapat bahwa dunia ini bukan zero sum game dimana satu aktor menang sedangkan aktor lainnya kalah. Namun berupa *variabel-sum game* yakni, melalui kerjasama, semua aktor akan mendapatkan keuntungan bersama.¹⁰

Dalam penelitian ini, neo-liberal institusionalis melihat pembentukan masyarakat baja dan batu bara (*European Coals Steel Community-ECSC*) di tahun

¹⁰ Robert O. Keohane. *International Relations and State Power*. Westview Press 1989. Hlm 8-9

1951 merupakan cikal bakal terjadinya tahapan intergenerasi di kawasan Eropa. Diawali dengan rencana Schuman, yang melatar belakangi pembentukan pasar bersama industri baja dan batu bara atau yang dikenal dengan nama masyarakat baja dan batu bara Eropa sebagai suatu cara yang rasional untuk menyelesaikan masalah-masalah keamanan sosial serta kebijakan-kebijakan transportasi.

Inetraksi pasar baja tersebut akhirnya meluas kesektor lainnya. Masyarakat baja dan batu bara Eropa berkembang menjadi Masyarakat Ekonomi Eropa dan Masyarakat Energi atom Eropa (Euratom) di tahun 1958. Pada tahun 1965, kedua organisasi tersebut melebur menjadi Masyarakat Eropa. Sehingga pada tahun 1993 terbentuklah kerjasama di kawasan Eropa Barat yang bergabung dalam Uni-Eropa.

Perjuangan Turki untuk bergabung dengan Uni Eropa telah dimulai sejak tahun 1963. Perdebatan mengenai ambisi Turki untuk menjadi anggota Uni Eropa (UE) lebih didekatkan pada isu hak-hak asasi manusia dan reformasi demokratis di negara itu. Padahal, harapan rakyat Turki menjadi anggota karena keinginan untuk bisa masuk dalam keanggotaan Uni Eropa dan itu akan membawa keuntungan-keuntungan ekonomi bagi Turki. Menurut Prof Semih S Tezcan dari Bogazici University, isu politik yang lebih mengemuka membuat Turki akan sulit diterima dalam keanggotaan Uni Eropa.

Janji 10 tahun akan dibahas hanyalah sebuah permainan yang akhirnya berakhir dengan penolakan terhadap Turki. "Padahal, dari sisi ekonomi, negara-negara Uni Eropa sudah banyak mengambil manfaat ekonomi dengan mengirim banyak material ke Turki. Sekarang, dengan alasan politik, mereka hanya mengambil waktu untuk menolak keanggotaan Turki," ujar Semih. Sesuai perhitungan Biro Perencanaan Pusat Belanda, perdagangan Turki dengan Uni Eropa akan meningkat paling tidak sepertiganya, sesudah Turki menjadi anggota Uni Eropa. Kesejahteraan penduduk akan bisa naik sebesar 9 persen dibandingkan sebelum menjadi anggota Uni Eropa.¹¹

Akan tetapi, meskipun Semih mengatakan Uni Eropa sudah banyak mengambil keuntungan, tetapi perlu diakui, keuntungan ekonomi bagi Uni Eropa sangatlah terbatas. Turki memiliki potensi sebagai tempat membangun pabrik karena upah

¹¹ Turki Berjalan ke Eropa Demi Perbaikan, Kompas, 25-04-2005. yang diakses melalui www.google.com

buruh rendah. Dengan sekitar 60 sampai 70 juta penduduk, Turki juga menjadi pasar yang penting meskipun standar kesejahteraan rata-rata penduduk Turki masih harus ditingkatkan dibandingkan negara Eropa lainnya. Investasi asing yang sangat dibutuhkan Turki adalah di sektor pertanian. Selain itu sektor infrastruktur dan lingkungan.¹²

Peluang itu sangat mungkin karena, menurut berbagai laporan dalam beberapa tahun belakangan, prestasi Turki di mata lembaga internasional sedikit membaik. Ini semua terkait dengan program pemulihan oleh Dana Moneter Internasional (IMF) yang membangkitkan negara itu dari krisis ekonomi. Seperti yang berlaku di semua negara, IMF menjadikan reformasi di bidang ekonomi sebagai syarat pinjaman. Hal ini disyaratkan karena Turki juga memiliki sistem birokrasi yang rumit, seperti di Indonesia.

Hal itulah yang membuat peluang terjadinya ekonomi biaya tinggi, setiap kali ada pengusaha yang harus berhubungan dengan birokrasi. Turki juga harus memenuhi pula standardisasi stabilitas ekonomi, demokrasi, dan perlindungan hak asasi menurut versi Uni Eropa.

Tanggapan serius dari Uni Eropa memang menjadi dambaan rakyat Turki, mengingat negara ini sudah mengajukan secara resmi untuk menjadi anggota Uni Eropa sejak tahun 1999.¹³

Sejarah modern Turki memang sudah mencatat bagaimana keinginan kuat dari negara itu untuk mendekati diri dengan Barat. Bapak modern Turki, Mustafa Kemal Atatürk, mendorong bangsa dan negaranya yang dibangun dari kehancuran Kekaisaran Ottoman untuk mengikuti pola pembangunan Barat yang sekuler, yang menekankan pembangunan dunia tanpa harus meninggalkan agama sebagai urusan pribadi masing-masing.

Perdebatan masih panjang. Namun, jika benar Turki ingin masuk ke Uni Eropa, konsekuensinya tidak kecil. Turki wajib mengakui Siprus sebelum perundingan dilaksanakan tanggal 3 Oktober 2005. Hal ini bukan sebuah keputusan yang gampang, mengingat persoalan Siprus ini ibarat duri dalam daging yang sudah terjadi sejak 30 tahun lalu.

¹² Ibid

¹³ Ibid

Bagi Erdogan, merupakan hal yang sulit untuk melepaskan Siprus. Namun, di sisi lain tuntutan untuk bergabung dengan Uni Eropa juga begitu kuat. Pilihannya hanyalah bagaimana pemerintahan Turki mampu memengaruhi Uni Eropa agar melonggarkan persyaratan. Apabila tidak, mereka akan menempuh jalan terjal untuk menjadi anggota Uni Eropa seperti yang mereka impikan.¹⁴

Keanggotaan Turki dalam Uni Eropa akan tergantung dari kemajuan usaha penyatuan kembali kedua bagian Pulau Siprus, sedangkan disisi lain menurut Rauf Denktash, Siprus yang bersatu hanya akan mengurangi hak-hak warga Siprus keturunan Turki.

Siprus terpecah sejak serbuan pasukan Turki tahun 1974 ketika terjadi pemberontakan yang dilancarkan oleh pendukung integrasi dengan Yunani. Turki menempatkan puluhan ribu tentara di bagian utara Pulau Siprus, dan merupakan satu-satunya negara yang mengakui negara Siprus-Turki. Rauf Denktash tidak mau melanjutkan perundingan antara kelompok Turki dan Yunani yang tadinya disponsori oleh PBB.¹⁵

1.4.1 Kerangka konseptual

Hubungan Internasional adalah kajian yang mempelajari berbagai fenomena yang melintasi batas nasional suatu negara yang dilakukan oleh para aktor. Para aktor tersebut meliputi individu, bangsa, kelompok bangsa dalam masyarakat dunia, kekuasaan-kekuasaan, tekanan-tekanan, proses yang menentukan cara hidup, cara bertindak dan cara berfikir manusia.¹⁶

Dalam penelitian ini, terdapat tiga aktor internasional yang terlibat yaitu Uni Eropa sebagai suatu organisasi internasional, Siprus sebagai negara anggota Uni Eropa, dan Juga Turki sebagai negara yang hendak bergabung dalam Uni Eropa. Negara didefinisikan sebagai suatu entitas legal yang dikuasai oleh sebuah otoritas pusat yang mempunyai wewenang untuk membuat hukum-hukum, peraturan-peraturan, serta keputusan dan kemudian menjalankan hukum-hukum

¹⁴ Opcit

¹⁵ www.VOA.com Uni Eropa dengan Turki.

¹⁶ Suwardi Wiriatmaja. Pengantar Ilmu Hubungan Internasional . Pustaka Tinta Mas. Bandung. 1970. Hlm 33

dan peraturan-perturan, dan keputusan-keputusan itu diambil dalam batasan geografis.¹⁷

Organisasi Internasional dapat didefinisikan sebagai pola kerjasama yang melintasi bata-batas negara, dengan didasari struktur organisasi yang jelas dan lengkap serta diharapkan atau diproyeksikan untuk berlangsung serta melaksanakan fungsinya secara berkesinambungan dan melembaga guna mengusahakan tercapainya tujuan yang diperlukan serta disepakati bersama, baik antara pemerintah maupun antara sesama kelompok non pemerintah pada negara yang berbeda.¹⁸

Berdasarkan penjelasan di atas, yang menandai terjadinya suatu hubungan internasional adalah adanya interaksi diantara aktor-aktor di dalam sistem internasional. Pada dasarnya, tujuan utama dari studi Hubungan Internasional adalah untuk mempelajari perilaku internasional, yaitu perilaku dari para aktornya baik negara ataupun non negara di arena transaksi internasional.

Negara bangsa pun saling berinteraksi dengan organisasi internasional, perusahaan multi nasional, kelompok sub-nasional, maupun individu tertentu.¹⁹

Interaksi internasional merupakan proses-proses komunikasi dan pertukaran antar aktor-aktor dalam sistem internasional yang relevan secara politis. Oleh karena itu, interaksi internasional akan mencerminkan sumberdaya, serta tindakan-tindakan dari aktor tersebut, dan akan dipengaruhi oleh konteks dan tingkatan dimana interaksi internasional tersebut terjadi.

Interaksi-interaksi yang terjadi dalam sistem internasional juga diperbaharui oleh adanya kepentingan nasional dari aktor-aktor yang terlibat dalam interaksi tersebut.²⁰

Dalam interaksi internasional, terdapat hubungan yang sifatnya kerjasama maupun konflik. Kerjasama dapat terjadi sebagai hasil dari penyesuaian tingkah laku oleh aktor-aktor sebagai tanggapan terhadap, atau dalam rangka mengantisipasi keinginan aktor lain. Kerjasama juga didefinisikan sebagai

¹⁷ Daniel S. Papp. *Contemporary International Relations Framework for Understanding Fifth Edition*. Allyn and Bacon Company. Boston. 1997 Hlm 30

¹⁸ T. May Rudi. *Administrasi dan Organisasi Internasional*. Bina Cipta. Bandung 1996. Hlm 23

¹⁹ Daniel S. Papp . *Op.Cit.* Hlm 9

²⁰ Brian Hocking dan Michael Smith. *World Politics and Introductions to International Relations*. Herfordshire: Harvester Wheatsheaf. Hlm 216-217

serangkaian hubungan yang tidak didasarkan pada koeresi atau kekerasan dan yang telah dilegitimasi, seperti dalam organisasi internasional, Uni Eropa misalnya.

Sementara itu, apabila suatu negara terlibat konflik dengan negara lainnya berarti mempunyai suatu kepentingan nasional yang berbeda satu dengan negara lainnya. Apabila kepentingan nasional yang ditujukan kepada negara lain mempunyai perbedaan dengan kepentingan negara yang dituju tersebut, maka pola hubungan interaksi yang terjadi diantara kedua negara tersebut akan membentuk konflik.²¹

Menurut Cantori dan Spiegel penyelesain ataupun pengurangan konflik antar negara dapat dilakukan melalui pembentukan organisasi internasional, khususnya organisasi regional. Suatu organisasi regional memiliki tiga orientasi tujuan yaitu: mendorong hubungan kerjasama antar negara anggota dimana antara negara tersebut tidak terjadi konflik, mengurangi tingkat konflik antar negara melalui manajemen konflik antar anggotanya yang berbeda pendapat ataupun konfrontasi antar negara anggota dengan negara non anggota. Adanya interaksi yang terus menerus antara aktor-aktor yang terlibat akan membawa hubungan tersebut ketingkat yang lebih tinggi, yaitu integrasi.

Ernst Haas menyatakan bahwa proses kerjasama akan memungkinkan para aktor internasional terintegrasi dalam suatu ikatan yang intensif.²²

Dalam usaha untuk mencapai tujuan-tujuan dan nilai-nilai yang dipertahankannya guna mempertahankan eksistensinya secara utuh, setiap negara tidak dapat mengisolir diri dari lingkungan eksternalnya. Mereka harus selalu mengadakan interaksi satu sama lain yang diadakan secara formal yaitu antar pemerintah suatu negara dengan pemerintah negara lainnya maupun hubungan yang diadakan oleh masing-masing negara yang melibatkan diri dalam semua aspek hubungan itu.

Ketika suatu negara melakukan aktifitas perdagangan, mereka saling tergantung pada kerjasama politik masing-masing negara guna mewujudkan

²¹ James E Dougherty dan Robert L. Pflatzgraff Jr. *Contending Theoris of International Relations*. fourth Edition. Harper Collin Publisher. 1997. Hlm 418-419

²² Mochtar Mas' oed. *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*, Jakarta LP3S. 1994. Hlm 153

tujuan ekonomi yang telah diterapkan, melalui perdagangan. Koehene dan Nye menyatakan bahwa di dunia internasional sekarang ini telah terbentuk suatu saling ketergantungan yang kompleks, dimana hubungan antar negara tidak lagi terbatas pada hubungan antara pemimpin negara, tetapi sudah menjadi hubungan pada tingkat-tingkat aktor yang berbeda dengan aktor-aktor yang berbeda.²³

Timbulnya hubungan perdagangan antar negara disebabkan oleh adanya perbedaan antara permintaan dan penawaran akan suatu barang di negara yang satu dengan negara yang lain. Perbedaan antara penawaran akan barang tersebut disebabkan oleh adanya ketidaksamaan faktor produksi antar negara yang satu dengan negara yang lainnya, baik mengenai kualitas, kuantitas, maupun dalam hal pada jenis produk. Sedangkan perbedaan permintaan disebabkan oleh jumlah dan jenis kebutuhan, jumlah pendapatan, kebudayaan, kesukaan, dan sebagainya.

Perdagangan internasional merupakan hubungan antara harga yang diterima oleh suatu negara sebagai pembayaran mekanisme eksportnya serta harga yang harus dibayarkan untuk impornya. Faktor penting bagi volume dan arah perdagangan internasional adalah kebijakan ekonomi domestik antar negara dan interaksi dari kebijakan-kebijakan tersebut.²⁴

Kerjasama perdagangan luar negeri menurut John Stuart Mill, David Ricardo, dan Adam Smith dapat memberikan sumbangan yang pada akhirnya mampu memperlaju perkembangan ekonomi suatu negara. Keuntungan lainnya dalam hubungan ekonomi dan perdagangan luar negeri dapat memperluas pasar serta hasil-hasil produknya sehingga memungkinkan suatu negara menggunakan teknologi yang lebih baik dari pada yang terdapat di dalam negeri.²⁵

1.4.2 Kerangka Analisis

Turki memiliki kepentingan yang sangat besar dalam menjalin kerjasama dengan Uni Eropa terutama dalam bidang ekonomi. Turki juga mengharapkan kerjasama perdagangan dengan Uni Eropa dapat mendorong transaksi

²³ Robert O Keohane. Op.Cit. hlm 116

²⁴ Jack C Plano, Roy O and Lawrence Z. International Relations : A Politics Dictionary. 1995. Hlm 160

²⁵ Sadino Sukirno. Ekonomi Pembangunan: Proses, Masalah, dan Dasar Kebijakan. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI. 1985. Hlm 225

perdagangan, meningkatkan tingkat perekonomian serta menekan laju inflasi di Turki.

Sedangkan Siprus masih bersikeras agar Turki melepaskan dukungannya terhadap Siprus Utara dan mendukung integrasi kedua Siprus, jika Turki ingin bergabung dengan Uni Eropa.

Uni Eropa sendiri telah membentuk suatu komisis untuk mengamati perkembangan Turki menuju keanggotaan dalam Uni Eropa yang berisikan tahapan-tahapan untuk mempersiapkan Turki sebagai anggota Uni Eropa.

1.5 Asumsi

Kemudian dalam merumuskan hipotesis penelitian ini, penulis menarik beberapa asumsi:

1. Apabila terdapat persamaan tujuan atau kepentingan, para aktor internasional akan melakukan interaksi internasional, melalui kerjasama, demi mencapai tujuan atau kepentingan bersama tersebut.
2. Interaksi yang berlangsung secara terus menerus antara para aktor internasional, terutama dalam bentuk kerjasama dapat membawa aktor-aktor tersebut ketahapan yang lebih tinggi yaitu intergrasi.
3. Dengan bergabungnya Siprus dalam keanggotaan Uni Eropa berimplikasi pada masuknya Turki dalam keanggotaan Uni Eropa.

1.6 Hipotesis

Hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut:

Dengan diterimanya Siprus sebagai anggota Uni Eropa akan menghambat jalannya Turki untuk bergabung dalam keanggotaan Uni Eropa.

1.7 Definisi Operasional

Definisi operasional dapat diartikan sebagai serangkaian prosedur pengujian guna pendeskripsian kegiatan yang harus dilakukan apabila hendak

mengetahui derajat eksistensi empiris bagi penerapan suatu konsep. Definisi operasional merupakan jembatan antara tingkatan konseptual teoritis dengan tingkatan observasional empiris.

Definisi operasional dari variabel-variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Kerjasama perdagangan Turki-Uni Eropa

Kerjasama perdagangan adalah suatu kesepakatan mengenai interaksi yang mencakup kepentingan Turki dan Uni Eropa guna meningkatkan transaksi perdagangan kedua belah pihak. Indikatornya adalah neraca perdagangan yaitu catatan sistematis tentang transaksi ekspor dan impor baik jasa maupun barang (transaksi yang sedang berjalan).

Kriteria Kopenhagen terdiri dari kriteria politik, ekonomi, serta kemampuan memenuhi kewajiban keanggotaan. Sedangkan perbaikan kondisi ekonomi Turki dapat dilihat dari tingkat pendapatan per kapita dan laju inflasi di Turki.

b. Diterimanya Siprus dalam keanggotaan Uni Eropa

Diterimanya Siprus dalam keanggotaan Uni Eropa bisa menjadi batu sandungan bagi Turki untuk masuk dalam keanggotaan Uni Eropa, hal ini dikarenakan oleh tidak bersedianya Turki dalam hal penyatuan Siprus Utara dengan Siprus Yunani, Turki juga belum membuka perairannya untuk kapal-kapal Siprus berlabuh di wilayah Turki.

1.8 Kajian Pustaka

Dalam Bab satu ini peneliti mencoba memasukkan tulisan yang relevansinya sesuai dengan skripsi yang dibuat oleh peneliti. Dalam bab satu ini tidak hanya berupa teori, tapi juga berupa contoh yang ada. Peneliti mencoba untuk membandingkan dengan skripsi Nandang, alumni Jurusan Hubungan Internasional Universitas Pansundan Bandung. Dalam Skripsinya sang penulis menulis tentang **“Peran PBB dalam Penyelesaian Sengketa Siprus”**. Skripsi ini peneliti jadikan sebagai salah satu pembanding dalam tinjauan materi yang peneliti ajukan, karena dari sejarah sampai diterimanya keanggotaan Siprus

Yunanai dan tidak diakuinya Siprus Turki juga berawal dari pertikaian ke dua etnis ini.

Permasalahan ini dimulai pada tahun 1963, ketika presiden Siprus mengajukan beberapa amandemen untuk memindahkan fungsi negara ini, Komunitas Siprus Turki menaggapinya dengan mengundurkan diri, para Menteri dari kabinet serta berhenti mengantor, kemudian semenjak pimpinan Siprus Turki bertindak selaku atas nama Pemerintahan.

Turki telah menyebabkan Siprus menjadi dua bagian dan mengabungkan pulau tersebut kewilayah Turki. Pada tanggal 15 Juli 1974 suatu perebutan kekuasaan tengah dilancarkan oleh militer Yunani lalu dengan kekuasaannya bermaksud untuk menjatuhkan Presiden Makarios dan Turki dengan alasan politik melancarkan invasinya, pada tanggal 20 Juli dengan suatu angkatan perang melawan ketidak berdayaan Siprus. Invasi ini telah dilaksanakan dengan dua langkah yaitu: Pada tanggal 20-22 Juli dan 14-16 Agustus, dimana pada akhirnya pasukan Turki menduduki 37% wilayah Pulau Siprus.

Ankara mencoba membenarkan invasi tersebut sebagai “operasi damai” yang ditujukan untuk perbaikan undang-undang yang terganggu oleh adanya perebutan kekuasaan, tetapi setelah perbaikan aturan tersebut dengan asumsi Glafirs Deriden ketua parlemen Siprus dan juru runding pihak Siprus Yunani diangkat sebagai pejabat Presiden sampai Makarios kembali pada bulan Desember 1974 dari pengasingan dengan jaminannya tetap tidak membuat pasukan Turki mundur dari rencana semula untuk menjajah Siprus sebagai langkah awal untuk penggabungan.

Sekitar 200.000 waraga Siprus Yunani atau 40% dari jumlah populasi Siprus Yunani dipaksa untuk meninggalkan kampung halamannya yang diduduki dan kembali menjadi pengungsi. Ribuan penduduk Siprus Yunani yang tetap tinggal di kampung halamannya setelah selesainya invasi secara berangsur-angsur dipaksa dengan cara menakut-nakuti mereka agar meninggalkan kampung halamannya, di Utara tepatnya di wilayah Karpass.

Turki melanjutkan 37% dari wilayah Siprus dengan tidak mengindahkan sama sekali resolusi PBB yang berulang kali menyerukan untuk menghormati kebebasan, kedaulatan serta kesatuan wilayah Republik Siprus seperti halnya

penarikan seluruh pasukan-pasukan asing di wilayah Siprus penggunaan seluruh tindakan yang berguna untuk memajukan pelaksanaan yang terkait dengan resolusi PBB.

Sikap Turki ini seperti halnya di atas yang terus melanjutkan pelanggaran hak asasi masyarakat Siprus mendapat kecaman dan kutukan dari komunitas Internasional seperti Parlemen Eropa, Gerakan Non Blok, Persemakmuran, dan Uni Eropa. Dalam laporannya Dewan Komisi Hak asasi Manusia menyatakan tingkat kekejaman yang dilakukan oleh tentara Turki.

Berdasarkan tujuan dan prinsip-prinsip dalam piagam PBB khususnya perdamaian dan keamanan, kerjasama Internasional dalam bidang ekonomi, sosial, budaya dan bidang lainnya serta HAM, Republik Siprus bergabung dengan PBB pada tanggal 20 September 1960 setelah mendapatkan kemerdekaannya dan secara berangsur-angsur menjadi anggota agen khusus PBB. Siprus juga menjadi anggota Uni Eropa. Siprus juga menjadi salah satu anggota Gerakan Non-Blok pada masa presiden pertama Siprus Uskup Makarios.

Dalam kebijakan ini Siprus ikut mengembangkan hubungan kerjasama yang baik dengan semua negara anggota, serta turut mengambil bagian dalam segala usaha yang bertujuan untuk mempromosikan perdamaian dan keamanan internasional dan mengembangkan hubungan bersahabat diantara bangsa-bangsa berdasarkan penghormatan.

Politik luar negeri Siprus tetap diabadikan untuk mencapai dua sasaran yaitu: di upayakan dalam rangka untuk mencari dukungan seluas-luasnya dari dunia internasional bagi penyelesaian masalah Siprus yang sejalan dengan resolusi DK PBB, yaitu penyatuan kembali negara Siprus dengan kedaulatan dan identitas tunggal Siprus, adapun target ke dua adalah supaya Siprus dapat bergabung kedalam Uni Eropa.

Kebijaksanaan politik luar negeri Siprus tersebut dilakukan oleh semua lembaga tinggi negara, kepresidenan, parlemen, dan dilakukan oleh lembaga tinggi lainnya termasuk partai-partai yang ada di Siprus Yunani dengan memanfaatkan hubungan mereka dengan pihak luar negeri.

Melalui keanggotaannya di forum internasional, terutama di PBB, Gerakan Non-Blok dan Dewan kerjasama Eropa, sejak tahun 1974 Siprus senantiasa

berusaha mencari dukungan badan internasional tersebut bagi penyelesaian masalah Siprus yang dianggap sudah cukup lama dan sangat mendesak.

Bahkan meski Siprus bukan anggota Organisasi Konferensi Islam (OKI), namun Siprus juga memberikan perhatian yang besar kepada badan internasional tersebut yang sebaliknya juga senantiasa membahas masalah Siprus, (mengingat penduduk Siprus Utara yang menganut agama Islam) dan serta merta mendukung tuntutan mereka dalam proses penyelesaian konflik meskipun terkadang tidak sejalan dengan semangat yang terkandung dalam resolusi DK-PBB seperti tuntutan Rauf Denktahs bagi pembentukan negara Siprus Utara yang diproklamasikan pada tahun 1983.

Selain dengan menggunakan pembandingan dari tinjauan pustaka diatas penulis juga menggunakan teori-teori yang berhubungan dalam membahas permasalahan dari Implikasi masuknya Siprus dalam keanggotaan Uni Eropa terhadap Proses penerimaan Turki dalam keanggotaan Uni Eropa yaitu:

Ekonomi-Politik Internasional

Ekonomi politik merupakan hasil dari antara kajian ekonomi dengan kajian politik, yang mempertimbangkan serta dipengaruhi oleh kondisi mekanisme pasar (unsur ekonomi) dan kondisi kehidupan sosial masyarakat serta pola kebijakan pemerintah (unsur politik) yang saling berkaitan dengan mekanisme pasar internasional dengan sistem masyarakat dunia yaitu sistem multi negara, pola hubungan antar negara serta kebijakan masing masing pemerintah yang mempengaruhi situasi pasar internasional baik dalam bidang perdagangan maupun di bidang moneter.²⁶

Ekonomi pada dasarnya adalah pengejaran atas kekayaan sedangkan politik adalah pengejaran atas power. Keduanya berinteraksi dengan cara yang kompleks. Undang-undang dan peraturan politik membentuk suatu kerangka

²⁶ John dan Steave smith Baylish. *The Globalization of world Politics : An Introduction to International Relations*. Oxford University. New York. 1999 Hlm 219.

dimana suatu pasar berlangsung. Pada saat yang sama, kekuatan ekonomi menjadi pondasi yang penting bagi kapabilitas politik.²⁷

Menurut Robert Gilpin, ekonomi politik dijelaskan melalui serangkaian pertanyaan dalam menjelaskan aktivitas ekonomi dan politik dari metode analisis dan perspektif teori. Serangkaian pertanyaan tersebut menyangkut bagaimana suatu negara dan proses politik dalam institusi domestik mempengaruhi produksi serta penyebaran kesejahteraan serta pengaruh kepentingan aktivitas-aktivitas ekonomi dan distribusi keuntungan maupun kerugian dari aktivitas ekonomi tersebut. Sebaliknya pertanyaan lain akan muncul ketika kekuatan ekonomi serta kekuatan pasar berpengaruh pada distribusi kekuatan suatu negara dan juga penyebaran kesejahteraan antar negara maupun aktor-aktor politik lainnya.²⁸

Ekonomi Politik Regional

Ekonomi-politik regional adalah studi mengenai ekonomi dan politik yang saling berhubungan di dalam suatu kawasan dan saling melengkapi. Ekonomi-politik regional akan memungkinkan mendorong terbentuknya suatu integrasi di bidang ekonomi dan akan mencakup pergerakan manusia, sikap-sikap politik, perkembangan sosial yang kompleks serta masyarakat transnasional dalam suatu kawasan.²⁹ Pada awalnya, Gilpin menekankan pada konsep ekonomi-politik pada tujuan dari aktivitas-aktivitas ekonomi dan politik.³⁰

Sistem pasar telah menjadi faktor penting dalam membentuk masyarakat modern. Kompetisi pasar dan tanggapan aktor-aktor ekonomi terhadap perubahan harga yang relatif dapat menggerakkan masyarakat ke arah peningkatan spesialisasi, efisiensi, dan mungkin bahkan integrasi dunia.³¹

²⁷ Robert Jackson dan Georg Sorenson. *Introduction to International Relations*. Oxford University Press. 1999 Hlm 176

²⁸ Robert Gilpin *The Political Economy of International Relations* Princeton University Press 1987 Hlm 9

²⁹ Hurel dan Kingsbury. *The International Relations of The Environment Actors*. Prentice Hlm 1992 Hlm 39

³⁰ Robert Gilpin Op Cit Hlm 11

³¹ Ibid., Hlm 65

Ekonomi Politik Domestik

Negara modern dan pasar berkembang secara bersama-sama dan terlibat dalam suatu interaksi timbal balik yang membentuk karakter dan dinamika hubungan internasional melalui suatu ekonomi politik domestik. Pengaturan pasar dapat dilakukan melalui adanya kesepakatan politik yang dicapai oleh negara-negara.³²

Pasar dapat mempengaruhi beberapa faktor internal, diantaranya adalah struktur sosial, kerangka kebijakan baik pada bidang domestik maupun internasional, teori ilmiah serta perkembangan teknologi, yang memberikan batasan dan dukungan kepada aktor-aktor ekonomi. Sementara itu, pasar sendiri juga mempengaruhi dan mentransformasikan faktor-faktor eksternal, seperti mengubah struktur sosial, mengubah hubungan politik, dan menstimulasi kemajuan ilmu dan teknologi.³³

Manajemen ekonomi yang dilakukan oleh suatu pemerintah pusat merupakan aspek dasar dalam mendefinisikan ekonomi-politik domestik suatu negara. Sarana terpenting dalam menjelaskan hal tersebut adalah melalui suatu kebijakan fiskal dan keuangan, kebijakan di bidang mata uang, *balance of payment*, nilai tukar mata uang yang akan berpengaruh pada volume ekspor dan impor serta kebijakan makro ekonomi dari pemerintah suatu negara.³⁴

Sifat dan ruang lingkup partisipasi negara dalam ekonomi dunia dipengaruhi oleh keputusan-keputusan politik yang dibuat dalam batasan-batasan tertentu. Pembuatan keputusan-keputusan politik tersebut sering dipengaruhi oleh kenyataan dimana kelompok-kelompok yang berbeda memiliki keperluan dan hasil juga diperoleh juga berbeda.³⁵

Kebijakan di bidang pajak, suku bunga, tarif dan negosiasi ekonomi dengan negara lain merupakan salah satu proses dalam pengambilan keputusan politik suatu negara. Lingkup yang lebih umum dari suatu proses pertanyaan tentang bagaimana pemerintah serta pihak swasta mengaitkan kepentingan mereka dengan membuat kebijakan ekonomi. Ekonomi domestik dipengaruhi oleh adanya

³² Ibid., Hlm 4

³³ Ibid., Hlm 65

³⁴ Thomas D Larison *International Political Economy The Struggle Power and Wealth*. Harcot Brace Company. 1997 Hlm 13-14

³⁵ Ibid., Hlm 5-6

faktor-faktor seperti ekonomi, politik, atribut budaya internal dari suatu negara, peluang serta pemilihan kebijakan yang di buat oleh elit yang berkuasa.³⁶

Interaksi Internasional

Interaksi merupakan suatu pertukaran antara dua atau lebih unit, seperti intraksi antar negara, kelompok, kelas, maupun individu. Unit-unit tersebut berinteraksi menurut dimensi waktu dan ruang yang dibentuk oleh faktor-faktor nyata seperti geografi dan faktor-faktor tidak nyata seperti geografi dan faktor-faktor tidak nyata seperti citra tentang pengalaman masa lalu.³⁷

Menurut Hocking dan Smith, interaksi internasional merupakan proses-proses komunikasi dan pertukaran antara aktor-aktor dalam sistem internasional yang relevan secara politis. Interaksi internasional ini akan mencerminkan tujuan-tujuan, sumberdaya-sumberdaya, serta tindakan-tindakan dari aktor-aktor tersebut. Interaksi internasional juga akan dipengaruhi oleh konteks dan tingkatan di mana interaksi itu terjadi.

Secara garis besar, hubungan antar aktor dalam interaksi internasional dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu: (1) hubungan yang menunjukkan derajat keharmonisan aktor yaitu hubungan konsesus, kolaborasi, dan integrasi; (2) hubungan yang menunjukkan konflik yang terjadi antar aktor politik, yaitu: manipulasi, kekerasan, dan penggunaan kekuatan bersenjata.

Howard J. Lentner mengelompokkan interaksi internasional menjadi empat pola-pola interaksi, yaitu:

1. Konflik, merupakan suatu kondisi yang menyerupai *zero-sum* dalam *game theory*, di mana kemenangan (gain) bagi suatu pihak merupakan kekalahan (lost) bagi pihak lainnya. Sebagian konflik diikuti dengan adanya campur tangan kekuatan militer. Situasi konflik ini dapat muncul di wilayah masing-masing aktor yang terlibat atau dapat pula muncul di wilayah ketiga (di luar wilayah teritorialnya);
2. Kompetisi, merupakan suatu kondisi yang dapat dibedakan dari konflik yang berdasarkan kriteria tertentu. Dalam kondisi kompetisi, tidak

³⁶ Ibid., Hlm 269

³⁷ William D Coplin *Introduction to International Politic : A Theoretical Overview*. Rand Mc Nally Collage Publishing Company 1992 Hlm 225

terdapat *zero-sum*, melainkan adanya keuntungan yang diperoleh bersama, meski tidak dalam proposi seimbang. Selain itu frekuensi kontak dalam kompetensi tidak sering terjadi dalam konflik. Dengan demikian, kompetisi lebih diwarnai oleh adanya desentralisasi struktur (dimana aktor berperan secara mandiri), bukan prulalisasi;

3. Kerjasama, merupakan suatu kondisi dimana negara-negara tua kelompok negara mengikuti kebijakan yang paralel dalam mencapai keuntungan bersama atau mencapai suatu tujuan. Konsultasi umumnya kerap dilakukan secara formal maupun institusional melalui serangkaian kesepakatan. Meski demikian. Hal ini tidak selalu berjalan dengan normal karena terkadang negara-negara bekerja sama tidak atas dasar kesamaan kepentingan, melainkan karena adanya situasi yang mengharuskan mereka untuk bekerja sama;
4. Integrasi, adalah suatu kondisi dimana terdapat tindakan bersama dan keterpaduan antara elemen-elemen dalam negara-negara yang berbeda. Integrasi sebagai upaya untuk memperluas pengakuan otoritatif atas keputusan negara satu dengan negara yang lainnya. Kondisi ini hampir serupa dengan kondisi domestik yang tersusun dari unsur-unsur pusat dan daerah dalam konsepsi *federalis*.³⁸

Kerjasama Intrnasional

Menurut Keohane, kerjasama didefinisikan sebagai penyesuaian sukarela oleh para aktor internasional terhadap kebijakan mereka sehingga mereka dapat mengatur perbedaan-perbedaan mereka demi mencapai keuntungan bersama. Kerjasama yang dilakukan secara terus menerus akan mengarah pada terjadinya proses integrasi pada tingkatan regional dan global. Kerjasama itu tidak muncul secara tiba-tiba namun membutuhkan perencanaan dan negosiasi.³⁹

Negara-negara melakukan kerjasama internasional untuk menyelesaikan masalah politik, sosial dan ekonomi dalam dua kondisi. Pertama, kondisi dalam lingkungan internasional, yang apabila dibiarkan akan merugikan negara. Contoh dalam tahap bilateral adalah patroli perairan bersama atau membantu menangkap

³⁸ Howard Letner . *Foreign Policy Analysis : A Comarative Conceptual Approach* . A Bell and Howell Company 1974 Hlm 86-88

³⁹ Robert O Keo Hane Op Cit Hlm 11

penjahat yang telah melarikan diri menyaberangi perbatasan. Di tingkat multilateral, adanya lintas perdagangan senjata ilegal yang sulit dikendalikan hanya lewat kebijakan nasional atau kerjasama bilateral, kondisi politik, sosial, ekonomi domestik tertentu yang dianggap berakibat luas sehingga dipandang sebagai permasalahan internasional. Kondisi sosial sebagai contoh tingginya tingkat buta huruf. Kondisi ekonomi, contohnya kurangnya dana pembangunan dan kondisi politik contohnya hak asasi manusia.⁴⁰

Motivasi-motivasi melakukan kerjasama internasional yakni: (1) permasalahan tidak dapat diselesaikan kecuali dengan kerjasama internasional; (2) pembangunan sumberdaya secara bersama akan meningkatkan efisiensi operasi di bidang apapun, bahkan di tingkat sermit kerjasama internasional.⁴¹

Kerjasama internasional berlangsung dalam tiga tahap. Pertama, setelah masalah diidentifikasi, langkah-langkah penjemabatanan atau *ad hoc* diambil oleh negara-negara yang paling berkenaan dengan masalah tersebut. Kedua, bila langkah-langkah tersebut tidak berhasil, negara-negara sering kemudian membentuk IGOs. Ketiga apabila permasalahan menjadi terlalu rumit dan ada kecenderungan melibatkan banyak IGOs, muncul usaha-usaha untuk mengkoordinasikan aktivitas IGOs tersebut. Namun, ketiga tahap tersebut masing-masing saling berkaitan. Meskipun tahap pertama sudah dilalui tentu langsung menuju tahap ke dua, begitu pula tahap ke dua langsung menuju tahap ke tiga.⁴²

Kerjasama Perdagangan

Menurut Gilpin, kerjasama perdagangan cenderung dapat mempersatukan para aktor internasional. Kerjasama perdagangan merupakan suatu sumber hubungan yang mengarah pada perdamaian antar aktor karena setiap aktor akan mendapatkan keuntungan bersama dari adanya hubungan perdagangan. Kerjasama perdagangan juga akan memperluas ketergantungan antar perekonomian nasional sehingga dapat meningkatkan hubungan kerjasama antar para aktor.⁴³

Kerjasama perdagangan adalah salah satu bidang terpenting yang dilakukan oleh para aktor negara guna memenuhi kepentingan nasionalnya.

⁴⁰ William D Coplin Op Cit Hlm 259

⁴¹ William D Coplin Op Cit Hlm 260

⁴² Ibid., Hlm 364

⁴³ Ibid., Hlm 31

Perdagangan tidak hanya sebagai salah satu instrumen ekonomi yang dijalankan guna mencapai kesejahteraan dan kemakmuran semata, namun juga telah dicapai untuk mencapai tujuan-tujuan politik negara.⁴⁴

Selain itu, perdagangan juga memiliki efek budaya melalui pengenalan nilai-nilai, ide-ide dan perilaku dari suatu masyarakat. Perdagangan akan mendorong ke arah perdamaian karena adanya saling ketergantungan ekonomi sehingga menciptakan efek positif antara masyarakat serta mendukung harmonisasi kepentingan.⁴⁵

Kerjasama perdagangan telah meluas di setiap bidang kehidupan karena kebutuhan masyarakat terhadap barang makin beraneka ragam. Beberapa keuntungan dari kerjasama perdagangan yakni: (1) transfer teknologi yang akan menghasilkan kesejahteraan ekonomi bagi semua orang; (2) kegiatan perdagangan yang melibatkan multi aktor akan menstimulus pertumbuhan ekonomi serta menghasilkan efisiensi ekonomi; (3) kerjasama perdagangan akan memperluas pasar, mendorong skala ekonomi dan meningkatkan kembali investasi; (4) pilihan bagi konsumen terhadap barang maupun jasa semakin beragam; (5) mengurangi biaya-biaya input seperti bahan-bahan mentah dan komponen-komponen manufaktur yang akan menurunkan biaya produksi.⁴⁶ Namun, proses pertukaran yang terjadi dalam perdagangan internasional bukan semata-mata merupakan hasil dari kekuatan pasar yang didasarkan pada penawaran dan permintaan, tetapi lebih merupakan hasil dari suatu jaringan tawar-menawar yang kompleks dan mengikat yang sebagian bersifat ekonomi dan sebagian lagi bersifat politik. Pertumbuhan nilai ekspor dari pada nilai impor akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Kondisi perdagangan merupakan suatu istilah yang biasa digunakan dalam perdagangan luar negeri, yaitu posisi perdagangan yang sebenarnya dari suatu negara yang mengekspor barangnya serta melakukan impor barang dari luar negeri. Kondisi perdagangan dapat diartikan sebagai rasio rata-rata nilai ekspor terhadap nilai impor suatu negara, khususnya dalam perdagangan barang. Ketika

⁴⁴ K. J. Holsti *International Politics : A Frame Work to Analysis* . 7 Editon .Prentice Haal. 1992
Hlm 302

⁴⁵ Robert Gilpin Op Cit Hlm 171

⁴⁶ Ibid., Hlm 170-171

nilai impornya meningkat lebih tinggi dari pada nilai eksportnya, maka dapat dikatakan kondisi perdagangannya buruk.⁴⁷

Perdagangan luar negeri dapat memberikan sumbangan yang mampu memperlaju perkembangan ekonomi suatu negara. Keuntungan lainnya dalam hubungan ekonomi dan perdagangan luar negeri memperluas pasar dan hasil-hasil produknya serta memungkinkan suatu negara menggunakan teknologi yang lebih baik.⁴⁸

Integrasi dalam Hubungan Internasional

Ernst B. Haas mendefinisikan integrasi sebagai proses dimana aktor-aktor politik pada tingkat nasional yang berbeda terdorong untuk memindahkan loyalitas, harapan dan kehormatan politiknya kepada suatu pusat baru, di mana pusat tersebut memiliki institusi yang menuntut dari yurisdiksi negara-negara tersebut

Integrasi merupakan suatu proses yang bertujuan untuk menggabungkan satu unit tunggal dari bagian-bagian yang terpisah. Integrasi juga dapat diartikan sebagai proses dimana individu atau kelompok yang tadinya berbeda satu sama lain menjadi sama, terutama apabila dilihat dari kepentingan dan sudut pandang mereka.

Tujuan integrasi dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian yaitu:

1. Potensi ekonomi, yaitu keinginan untuk meningkatkan potensi ekonomi;
2. Potensi politik, yaitu untuk memaksimalkan potensi politik. Negara-negara yang tidak memiliki kekuasaan politik akan berupaya masuk kedalam suatu integrasi sebagai upaya untuk mengoptimalkan peran diplomasi mereka;
3. Resolusi konflik, yaitu sebagai upaya untuk meredam setiap potensial konflik antar negara yang bertetangga.

Integrasi ekonomi dapat diukur dengan jelas melalui volume transaksi ekonomi antar unit-unit yang di analisis. Ada beberapa faktor yang dapat mendorong tumbuhnya integrasi yaitu adanya nilai-nilai atau ideologi bersama

⁴⁷ Paul R Viotti dan Mark V Kauppi . *International Relations Theory : Realism, Pluralism, Globalism*. Mc Millan Publisaer. New York. 1993 Hlm 595

⁴⁸ Sadino sukirno *Ekonomi Pembangunan Proses dan Dasar Kebijakan*. Fakultas Ekonomi UI Jakarta. 1985 Hlm 225

yang dipakai dalam satu komunitas, latar belakang, sejarah, serta adanya toleransi atas perbedaan kultural.⁴⁹

Organisasi Internasional

Organisasi internasional dapat didefinisikan sebagai pola kerjasama yang melintasi batas-batas negara, dengan didasari struktur organisasi yang jelas dan lengkap serta diharapkan atau diproyeksikan untuk berlangsung serta melaksanakan fungsinya secara berkesinambungan dan melembaga guna dicapainya tujuan-tujuan yang diperlukan serta disepakati bersama, baik antara pemerintah maupun antara sesama kelompok non-pemerintah pada negara yang berbeda. Menurut John T Rourke keanggotaan Dalam organisasi internasional terbuka terhadap semua negara. Organisasi internasional dapat diklasifikasikan berdasarkan cakupan geografis tertentu atau cakupan fungsi organisasi, persetujuan prinsip, kegiatan organisasi serta suatu standar politik tertentu.⁵⁰

Pada umumnya, organisasi internasional memiliki tujuan masing-masing tercantum di dalam dokumen dasar sebagai suatu kesepakatan bersama. Secara garis besar tujuan pembentukan suatu organisasi internasional yaitu sebagai upaya meminimalisasi atau mengendalikan konflik antar negara, mengembangkan hubungan secara damai, mengembangkan dan memajukan kerjasama untuk memberikan keuntungan pada setiap anggotanya serta mencegah ancaman eksternal dengan cara membentuk suatu pertahanan bersama.

Fungsi utama dari suatu organisasi internasional adalah untuk mengadakan upaya-upaya kerjasama antar negara dalam bidang tertentu, dimana kerjasama tersebut memberikan keuntungan bagi seluruh atau sebagian besar anggotanya. Suatu organisasi internasional mempunyai fungsi utama untuk mengadakan kontak diplomatik secara berkesinambungan antar negara, mengontrol konflik serta sebagai fasilitas bagi interaksi ekonomi antar negara.

Klasifikasi Organisasi Internasional

Berdasarkan ruang lingkup kegiatan dan keanggotaan, organisasi internasional dapat digolongkan menjadi dua yaitu:

⁴⁹ Peter Toma dan Robert F Gorman. *International Relations : Understanding Global Issues*. Brooks/Cole Publishing Company California 1991 Hlm 389

⁵⁰ John T Rourke *International Politics on the World Stage* . Dushkin Publication. New York. 1991 Hlm 442

1 Organisasi Internasional Global

Wilayah kegiatannya adalah global dan keanggotaan terbuka dalam ruang lingkup di berbagai penjuru dunia. Contoh: Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB)

2 Organisasi Internasional Regional

Wilayah kegiatan adalah regional, dan keanggotaannya hanya diberikan bagi negara-negara kawasan tertentu saja. Contoh: Uni Eropa, ASEAN, OAU.

Berdasarkan tujuan dan luas-bidang kegiatan organisasi, organisasi internasional dapat digolongkan menjadi dua, yaitu :

- a. Organisasi Internasional Umum. Tujuan organisasi serta bidang kegiatannya bersifat luas dan umum, tidak hanya menyangkut bidang tertentu. Contoh: Uni Eropa dan PBB
- b. Organisasi Internasional Khusus. Tujuan organisasi dan kegiatannya adalah khusus pada bidang tertentu atau menyangkut hal tertentu saja. Contoh : OPEC.

Berdasarkan ruang lingkup dan bidang kegiatan, organisasi internasional dapat digolongkan menjadi empat, yaitu:

- 1 Organisasi internasional : Global-Umum. Contoh: PBB
- 2 Organisasi internasional : Global-Khusus. Contoh: OPEC, UPU , UNESCO
- 3 Organisasi internasional : Regional-Umum. Contoh : Uni-Eropa , ASEAN
- 4 Organisasi internasional : Regional-Khusus. Contoh : AIPO, OAPEC, PATA.

Organisasi Regional

Organisasi Regional adalah suatu bagian dari dunia, yang diikat oleh seperangkat tujuan bersama berdasarkan ikatan geografis, sosial, budaya, atau politik, serta memiliki struktur formal untuk memwadahi perjanjian formal antar pemerintah di dalamnya.

Menurut penganut paham regionalis, kerjasama regional lebih penting dari pada Kerjasama universal karena : 1 Adanya kecenderungan alami menuju suatu regionalisme didasarkan atas suatu homogenitas dari kepentingan , tradisi serta

nilai dari kelompok kecil suatu kehidupan bertetangga negara. 2 Integrasi politik, ekonomi serta sosial yang lebih sedikit dengan ruang lingkup yang lebih sempit. 3 Ancaman *internal terhadap* perdamaian akan segera diupayakan penyelesaiannya oleh pemerintah tersebut dibandingkan dengan upaya penyelesaian konflik dengan jangkauan yang lebih luas.

Menurut Coulumbis, ada empat kriteria umum untuk mendefinisikan kawasan:

- 1 Kriteria geografis, mengelompokkan negara berdasarkan lokasinya dalam benua, sub-benua, kepulauan dan lain-lain. Misalnya Asia, Eropa, Afrika.
- 2 Kriteria politik atau militer, mengelompokkan negara berdasarkan keikutsertaannya dalam berbagai aliansi, atau berdasarkan orientasi ideologis dan politik. Misalnya NATO dan Negara Dunia ketiga.
- 3 Kriteria ekonomi, mengelompokkan negara-negara berdasarkan kriteria terpilih mengenai perkembangan (pembangunan) ekonomi, seperti GNP, Misalnya negara-negara industri maju, Negara-negara berkembang.
- 4 Kriteria transaksional, mengelompokkan negara-negara berdasarkan jumlah atau frekuensi pertukaran penduduk, barang, jasa, turis dan perdagangan. Misalnya kawasan Amerika Utara, Eropa Barat, Eropa Timur.

1.9 Metode dan Teknik Pengumpulan Data

1.9.1 Metode Penelitian

Metode adalah prosedur atau cara yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu. Penelitian ini akan menggunakan metode deskriptif yang digunakan untuk menggambarkan implikasi penerimaan Siprus dalam keanggotaan Uni Eropa terhadap proses masuknya Turki dalam keanggotaan Uni Eropa.

Metode deskriptif adalah metode penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan serta menjelaskan peristiwa secara cermat dan terperinci sehingga diperoleh pemahaman tentang sesuatu yang telah terjadi.

Penggambaran dalam metode deskriptif berhubungan dengan apa, siapa, bilamana, dimana, dan bagaimana suatu gejala serta mencoba mendapatkan,

menyampaikan fakta-fakta dengan jelas, teliti dan lengkap tanpa banyak detail yang penting.

1.9.2 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi literatur (kepuustakaan) yang didukung oleh data-data sekunder dari berbagai bahan bacaan, baik dalam bentuk buku, jurnal, penerbitan khusus surat kabar, majalah, maupun dokumen lain yang relevan dengan materi penelitian. Selain itu juga dilakukan pencarian data dengan media internet melalui penelusuran web sites.

1.10 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan adalah menguraikan pembabakan disertai pokok-pokok yang akan dikemukakan. Penelitian ini disusun dalam lima Bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, asumsi, hipotesis definisi operasional, metode penelitian, teknik pengumpulan data, dan sistematika penulisan.

BAB II : UNI EROPA

Bab ini berisikan tentang latar belakang terbentuknya Uni Eropa sebagai salah satu organisasi internasional dan merupakan sebuah contoh raw model bagi organisasi yang lainnya.

BAB III : SIPRUS

Bab ini berisikan tentang proses penerimaan Siprus dalam keanggotaan Uni Eropa dan apa penyebab diterimanya Siprus sebagai anggota Uni Eropa

BAB IV : PEMBAHASAN

Bab ini membahas mengenai hasil dari hubungan antara variabel yang akan dijelaskan dan dilakukan analisis mengenai Implikasi masuknya Siprus dalam Keanggotaan Uni Eropa terhadap Proses penerimaan Turki dalam keanggotaan Uni Eropa.

BAB V: KESIMPULAN

Bab ini berisikan pokok-pokok hasil pembahasan berdasarkan pertimbangan pemilihan kenyataan-kenyataan penting terhadap objek dan berisikan kesimpulan penelitian dan saran-saran untuk perbaikan yang berkenaan dengan proses dari hasil penelitian.

